

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai negara agraris. Penduduk Negara Indonesia mayoritas masih bekerja dan menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan yang penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor dengan potensi yang cukup besar. Pada tahun 2023, subsektor ini menyumbang sebesar 3,88% terhadap total PDB dan 30,99% terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, menjadikannya subsektor utama dalam sektor tersebut (Kementerian Pertanian, 2023).

Menurut Ardhi et al. (2018) kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran signifikan dalam sektor pertanian. Perkebunan kelapa sawit berfungsi sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pengembangan agribisnis, mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, kelapa sawit menyediakan peluang kerja yang luas, menjadi sumber pendapatan bagi petani, dan berkontribusi besar dalam menghasilkan devisa bagi negara.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Rakyat (PR) yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan pulau dengan luas lahan terbesar di Indonesia. Salah satu provinsi sentra kelapa sawit di pulau Sumatera adalah Provinsi Jambi yaitu seluas 1.129.925 ha (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2023).

Pengembangan kelapa sawit di Provinsi Jambi memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dilihat selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 hingga 2023, subsektor perkebunan kelapa sawit rakyat menunjukkan peningkatan luas areal dan produksi. Rata-rata pertumbuhan luas lahan mencapai 20% per tahun, sementara rata-rata pertumbuhan produksi kelapa sawit juga meningkat sebesar 20% per tahun. Produktivitas kelapa sawit mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2023, yang menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan lahan, efisiensi dari hasil panen tidak selalu meningkat seiring dengan bertambahnya luas lahan (lampiran 1).

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi tersebar di sembilan kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, Merangin, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Sarolangun dan Kerinci. Kabupaten dengan luas perkebunan rakyat terbesar adalah Kabupaten Muaro Jambi, yang menyumbang 20,80% dari total luas, diikuti oleh Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kontribusi masing-masing sebesar 17,86% dan 13,74%. Tabel luas lahan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM), Tanaman Menghasilkan (TM), Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM), luas areal, produksi, produktivitas kelapa sawit menurut kabupaten dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit Perkebunan Provinsi Jambi Menurut Kabupaten Tahun 2023

Kabupaten	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
	TBM	TM	TTM	Jumlah		
Batanghari	28.530	160.706	12.674	201.910	548.927	3.416
Muaro Jambi	34.019	173.029	35.682	235.044	444.735	2.570
Bungo	30.423	79.900	14.920	124.901	311.093	3.894
Tebo	16.972	80.082	11.272	108.326	209.497	2.616
Merangin	23.977	76.006	35.633	135.616	255.750	3.365
Sarolangun	20.496	69.619	4.470	94.585	217.245	3.121
Tanjung Jabung Barat	34.335	113.932	6.716	155.325	326.728	2.868
Tanjung Jabung Timur	12.404	54.248	7.481	74.133	126.139	2.325
Kerinci	40	44	-	84	32	727
Kota Jambi	-	-	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-
Jumlah	201.196	807.566	128.848	1.129.924	2.440.146	2.767

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi salah satu kabupaten yang memiliki luas perkebunan terbesar ke tiga di Provinsi Jambi dengan luas areal 155.325 ha, namun dari segi produksi dan produktivitas Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya 326.728 ton sedangkan produktivitas 2.868 ton/ha lebih rendah dari Kabupaten Sarolangun yang memiliki luas areal hanya 94.585 ha dengan produktivitas 3.121 ton/ha. Hal ini disebabkan oleh lahan yang mengalami kerusakan atau mati ataupun tanaman tua yang belum di remajakan (*replanting*).

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu wilayah dengan sumber daya alam yang berpotensi mendukung usaha di sektor pertanian, khususnya pada

subsektor perkebunan. Dalam bidang usaha perkebunan, terutama perkebunan rakyat yang menjadi komoditas unggulan yang memiliki tren peningkatan luas tanam dari tahun ke tahun tersebar di 13 kecamatan. Adapun luas areal, produksi, produktivitas, serta jumlah petani kelapa sawit di setiap kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Luas Area (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Petani (KK)
	TBM	TM	TTM	Total			
Tungkal Ilir	22	149	-	171	195	1.309	175
Seberang Kota	84	41	-	125	98	2.390	77
Bram Itam	501	3.260	10	3.771	4.099	1.257	1.624
Tungkal Ulu	2.628	7.462	1.555	11.654	25.034	3.355	4.419
Tebing Tinggi	539	16.854	1.531	18.924	32.598	1.934	7.420
Batang Asam	4.940	10.410	921	16.271	34.409	3.305	4.882
Merlung	4.889	5.545	1.959	12.393	15.285	2.756	4.180
Renah	3.259	4.152	440	7.851	11.602	2.796	3.036
Mendaluh							
Muara Papalik	3.029	7.334	300	10.663	23.723	3.235	3.356
Betara	660	1.953	-	2.613	2.055	1.051	1.208
Kuala Betara	56	340	-	396	1.329	3.909	236
Pengabuan	1.559	213	-	1.772	682	3.200	954
Senyerang	631	933	-	1.564	1.456	1.561	830
Jumlah	22.797	58.646	6.716	88.168	152.565	2.466	32.397

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2023

Berdasarkan Tabel 2, Kecamatan Merlung memiliki lahan perkebunan rakyat seluas 12.393 hektar, yang setara dengan 14,05% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan kontribusi produksi sebesar 10,01%. Kecamatan ini menempati peringkat kelima dalam hal produktivitas

tertinggi di kabupaten tersebut, dengan tingkat produktivitas mencapai 2.756 ton per hektar. Selain itu, jumlah petani kelapa sawit di Kecamatan Merlung tercatat sebanyak 4.180 kepala keluarga (KK), atau 12,90% dari total petani kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perkebunan kelapa sawit menjadi sumber utama pendapatan serta pendorong pertumbuhan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat di wilayah Merlung.

Rendahnya produktivitas kelapa sawit yang dimiliki oleh Kecamatan Merlung ini dipengaruhi oleh banyaknya tanaman yang sudah tidak produktif atau Tanaman Rusak (TR). Tanaman yang sudah tua atau tidak produktif lagi harus segera dilakukan peremajaan, hal ini dapat ditunjukkan dari luas areal Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) atau Tanaman Rusak (TR) seluas 1.959 ha pada tahun 2023 sebesar 29,16 %, paling besar dibanding kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu harus segera dilakukan peremajaan kelapa sawit. Saat ini, peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercatat menjadi peremajaan sawit terluas ke dua di Provinsi Jambi, mencapai 2.043 hektar yaitu sebesar 15,07 % dari 13.547 hektar total keseluruhan peremajaan kelapa sawit di Provinsi Jambi (lampiran 2).

Kecamatan Merlung dalam peremajaan kelapa sawit mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk peremajaan tanaman kelapa sawit melalui program pendanaan BPDPKS. Berikut data perkembangan rekomtek ditjenbun dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka BPDPKS di Kecamatan Merlung.

Tabel 3. Perkembangan Rekomtek Ditjenbun Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka BPD PKS di Kecamatan Merlung

Lembaga Pekebun	Tanggal Rekomtek	Rekomtek Ditjenbun (Ha)	Realisasi Tanam (Ha)	Tahun Tanam	Jenis Pola
KUD Karya Jaya	28/11/2018	751,924	741,772	2021	Mitra
Koperasi	13/12/2018	220,871	210,685	2021	Mitra
Manunggal Jaya					
KUD Panca Mukti	26/12/2019	568,378	557,986	2021	Mandiri
KUD Karya Jaya	22/04/2020	57,261	54,261	2022	Mitra
KUD Karya Kita	22/06/2020	586,349	586,349	2022	Mandiri
KUD Karya Kita	18/09/2024	386,797	-	-	Mandiri
Total	-	2.589,058	2.151,056	-	

Sumber: Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Merlung 2024

Tabel 3 menjelaskan bahwa pada tahun 2018-2024 jumlah luas lahan peremajaan kelapa sawit yang sudah terealisasi di Kecamatan Merlung adalah sebesar 2.151,056 ha, yang terdiri dari skema pelaksanaan peremajaan pola kemitraan seluas 1.010,067 ha dan skema pola mandiri seluas 1.144,335 ha. Petani di Kecamatan Merlung sudah melakukan peremajaan kebun kelapa sawit yang mereka miliki, mereka memanfaatkan program yang diberikan oleh pemerintah melalui program pendanaan BPD PKS yang tentunya sangat membantu biaya bagi petani untuk melakukan peremajaan tersebut. Terdapat dua model pola yang diterapkan petani kelapa sawit di Kecamatan Merlung dalam peremajaan kelapa sawit yaitu yang pertama adalah pola kemitraan sedangkan yang ke dua adalah pola mandiri.

Keputusan dalam memilih pola untuk melakukan peremajaan kelapa sawit merupakan keputusan kompleks bagi petani kelapa sawit di Kecamatan Merlung yang bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit. Ketika petani memilih skema peremajaan pola mandiri yang pengelolaannya oleh petani itu sendiri

kegagalan peremajaan adalah tantangan besar yang memengaruhi keberlanjutan kebun kelapa sawit dan kesejahteraan petani. Ketakutan terhadap utang dalam pola kemitraan juga menjadi hambatan utama bagi petani. Kekhawatiran ini muncul karena pola kemitraan melibatkan pembiayaan yang harus dikembalikan melalui hasil panen dalam jangka waktu tertentu.

Keputusan petani dalam memilih pola peremajaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti umur petani yang lebih tua cenderung memilih pola kemitraan untuk mendapatkan dukungan eksternal sedangkan petani muda lebih memilih pola mandiri, tingkat pendidikan petani yang rendah memilih pola kemitraan untuk dukungan teknis, finansial, dan pemasaran, sementara petani berpendidikan tinggi lebih mandiri dalam pengelolaan dan petani berpendapatan rendah cenderung memilih kemitraan karena keterbatasan finansial, sedangkan petani dengan pendapatan tinggi memilih pola mandiri untuk keuntungan maksimal. Faktor eksternal seperti luas lahan petani dengan lahan kecil memilih kemitraan karena keterbatasan modal dan kapasitas teknis, sedangkan lahan besar mendorong pola mandiri karena kapasitas finansial yang lebih baik, Aksesibilitas petani dengan akses pasar terbatas lebih memilih kemitraan untuk jaminan harga dan dukungan logistik, sementara petani dengan akses pasar yang baik memilih pola mandiri untuk keuntungan maksimal serta status kebun petani eks-plasma lebih memilih kemitraan karena hubungan dengan perusahaan inti, sementara petani non-eks-plasma memilih pola mandiri untuk kontrol penuh atas kebun meski berisiko lebih tinggi.

Petani kelapa sawit di Kecamatan Merlung menghadapi berbagai pertimbangan dalam memilih pola peremajaan kebun kelapa sawit, baik pola kemitraan maupun pola mandiri. Keduanya memiliki keuntungan dan tantangan yang berbeda, yang bisa mempengaruhi keputusan akhir petani. Berdasarkan fenomena diatas, perlu diteliti agar terlihat jelas bagaimana ” **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Pemilihan Skema Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Merlung**”.

1.2 Perumusan Masalah

Merlung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebagian besar pendapatan masyarakatnya dari hasil perkebunan kelapa sawit. Tahun tanam perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Merlung dilakukan pada tahun 1981-1991. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Kecamatan Merlung terdapat tanaman tua atau tanaman rusak seluas 1.959 ha terluas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian tanaman kelapa sawit saat ini sudah melewati umur ekonomis.

Dalam peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit difasilitasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR). Program peremajaan Kelapa Sawit rakyat (PSR) menyalurkan bantuan dana kepada petani sebesar Rp. 30 juta/ha untuk membantu petani kelapa sawit dalam melakukan peremajaan. Keputusan dalam memilih pola untuk melakukan peremajaan kelapa sawit merupakan keputusan kompleks bagi petani kelapa sawit di Kecamatan Merlung.

Skema pola kemitraan dalam peremajaan kebun kelapa sawit adalah pendekatan di mana petani bekerja sama dengan pihak lain, seperti perusahaan besar, koperasi, atau lembaga pemerintah, untuk melakukan peremajaan kebun. Adapun hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat harus diatur secara adil untuk memastikan keberhasilan kerjasama. Dalam pelaksanaannya pola kemitraan pada peremajaan kelapa sawit di Kecamatan Merlung petani dilarang melakukan aktivitas apapun dikebun mereka sendiri selama kegiatan peremajaan sampai tanaman menghasilkan. Selanjutnya kewajiban petani harus membayar pinjaman dana yang diberikan oleh perusahaan, karena dana yang diberikan oleh BDPKS tidak mencukupi dalam peremajaan kebun kelapa sawit. Pola kemitraan ini memberikan keuntungan berupa bantuan dan dukungan yang lebih terstruktur. Namun, pola ini juga memerlukan komitmen dan kesepakatan yang adil agar tidak merugikan pihak petani dalam jangka panjang.

Peremajaan kelapa sawit dengan pola mandiri merupakan upaya petani untuk mengganti tanaman kelapa sawit tua atau tidak produktif dengan tanaman baru secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak perusahaan atau mitra inti. Pola ini juga diambil oleh petani di Kecamatan Merlung yang memiliki kontrol penuh atas lahan mereka dan sumber dayanya. Petani bertanggung jawab atas seluruh proses peremajaan, termasuk penanaman, perawatan, dan pemasaran hasil panen. Namun kekurangan pola mandiri dalam peremajaan kelapa sawit, petani menanggung risiko kegagalan peremajaan sendiri serta hasil peremajaan bergantung pada kemampuan dan pengetahuan petani, yang bisa berbeda-beda antara satu petani dengan lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana gambaran umum skema pelaksanaan peremajaan kelapa sawit antara pola kemitraan dan pola mandiri di Kecamatan Merlung?
2. Apakah faktor (umur petani, tingkat pendidikan petani, pengalaman berusahatani, luas lahan, pendapatan petani, infrastruktur jalan, jarak PKS dan status kebun petani) mempengaruhi keputusan petani dalam memilih skema peremajaan tanaman kelapa sawit di Kecamatan Merlung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menggambarkan skema pelaksanaan peremajaan antara pola kemitraan dengan pola mandiri di Kecamatan Merlung.
2. Menganalisis faktor (umur petani, tingkat pendidikan petani, pengalaman berusahatani, luas lahan, pendapatan petani, infrastruktur jalan, jarak PKS dan status kebun petani) yang mempengaruhi keputusan petani dalam pemilihan skema pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit di Kecamatan Merlung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit di Kecamatan Merlung. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan pengetahuan mengenai keputusan petani dalam pemilihan skema pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Kecamatan Merlung, serta dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Petani, sebagai informasi terkait pelaksanaan peremajaan di kebun kelapa sawit rakyat.
- b. Bagi Pemerintah, daerah Kecamatan Merlung dan pemangku kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dalam program PSR.
- c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti dalam penelitian yang sedang dilakukan.